

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.D. Belinfante et.al., *Beginnelsen van Nederlandse staatsrecht*, Samson Uitgeverij, Alpen aan den Rijn, 1983.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1983.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Khoirul Huda, *Pertanggungjawaban Hukum Maladministrasi*, Yudharta Press, Pasuruan, 2015.
- Kranenburg dan Vegting, *Inleiding in het Nederlands Administratief Recht*, (terjemahan), Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Perkuat Kerjasama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik*, Jakarta, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 94.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Teori*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 110.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Jakarta, 2015.

Yustika Mahdania, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru-Riau, 2016, hlm. 53.

Jurnal/ Majalah

Abdul Latif, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU TIPIKOR*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

A.D. Belinfante et.al., *Beginnelsen van Nederlandse Staatsrecht*, Samson Uitgeverij, Alpen aan den Rijn, 1983, hlm. 21.

A.M. Christia dan B. Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Law Reform, vol. 15, no. 1, Mar. 2019, hlm. 149-163.

Atmadja dalam Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, *Menyongsong Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 14, No. 1, 2019.

Bram Mohammad Yasser, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, *Menyongsong Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 14, No. 1, 2019.

Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024.

F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1983.

Ginting dalam Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, *Menyongsong Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 14, No. 1, 2019.

Indrawati Yuhertiana, Tituk Dwi Widajatie, dan Fajar Saiful Akbar, *Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

Joshua, *Tanggung Jawab Kepala Desa terhadap Kesalahan Pengelolaan Dana Desa Dikaitkan dengan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, 2020.

Kukun Abdul Syakur Munawar, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3, No 2, 2015.

- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 18-19.
- Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, dan Lalu Parman, *Tindakan Maladministrasi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, No. 2, Januari 2020.
- Muslimah Hayati, *Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 1, Februari 2021.
- Nurdian Susilowati et al., *Community Trust in Village Financial: The Role of External Pressure and Corruption Perception*, Journal of Accounting and Business Education, Vol. 8, No. 2, December 2023.
- Nur Alfiani, *Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa atas Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.
- Odie Faiz Guslan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018.
- O. Hood Phillips dan Jackson, *Constitutional and Administrative Law*, 8th ed., Sweet and Maxwell Ltd, London, 2001.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi Sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi (Maladministration as the Criteria of Review of Administrative Behaviour)*, Makalah Seminar Non-Judicial Enforcement of Human Rights and Good Governance, Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, Surabaya, 15-17 April 2004.
- Tamala Sari Martha Prakoso, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014.

Artikel Internet

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=55483>
- KANNI Kabupaten Bogor, *Soroti Tiga Kades Ditangkap Karena Dugaan Korupsi*, <https://bogoronline.com/2024/01/kanni-kabupaten-bogor-soroti-tiga-kades-ditangkap-karena-dugaan-korupsi/>, 2024, diakses pada tanggal 23 September 2024.

Singgih Samsuri, *Maladministrasi dan Korupsi*, 2020, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dan-korupsi> diakses pada tanggal 23 September 2024.

Wildan Pratama, *Empat Kades Asal Bojonegoro Korupsi Dana Pembangunan Jalan dengan Total Rp 1,2 M*, *suara surabaya*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/empat-kades-asal-bojonegoro-korupsi-dana-pembangunan-jalan-dengan-total-rp12-m/>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby